

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pasca lahirnya UU P2SK, LPS mendapat kewenangan baru yaitu menjadi penjamin Asuransi. Seiring dengan kewenangan LPS yang semakin kuat dan besar, LPS juga telah memiliki hak suara pada KSSK. Menurut Teori Legalitas/Teori Kewenangan, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang yang diperoleh oleh LPS secara atribusi, bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang- undangan yaitu dari UU LPS, UU PPKSK dan UU P2SK.
2. UU P2SK mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan. Pada dunia perbankan, kelembagaan LPS diperkuat kewenangannya karena LPS merupakan salah satu penyokong kestabilan ekonomi penguatan kewenangan LPS dalam melaksanakan fungsi penjamin simpanan dan resolusi bank, dan pemberian mandat baru kepada LPS sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi, diikuti dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengaturan oleh otoritas pengawasan asuransi.

B. Saran

Secara teoritis, tanpa komitmen penuh semua pihak yang terlibat baik dari pihak yang membuat Undang-Undang, pihak pelaksana Undang-Undang, maupun pihak pengawas Undang-Undang maka akan sulit untuk mewujudkan pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya bagi lembaga pembiayaan. Oleh sebab itu, sinergitas bisa menjadi kunci utama dalam mewujudkan penguatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok.

Elyana Novira, 2023, *Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

_____, 2023, *Kewenangan Penjaminan Dan Resolusi Bank Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023*, C.V Green Publisher Indonesia, Cirebon.

Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hary Prasetya, 2016, Mengupas Peran (Penting) LPS Dalam Sistem Perbankan, Indie Publishing, Depok.

Ikatan Bankir Indonesia, 2013, *Memahami Bisnis Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sitompul, Zulkarnain, 2007, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Books Terrace & Library, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-XVIII, Rajawali Pers, Depok.

Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok.

Zainal Asikin, 2020, *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*, Rajawali Pers, Depok

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

C. Sumber Lain

Fahdiansyah Kasmiri, 2024, *Hadirnya UUP2SK Mandat LPS Setara Dengan Lembaga Penjamin Simpanan di Negara Maju*,
<https://lps.go.id/indeks/siaran-pers/>,

JDIH Merves, 2023, *UU 4/2023: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, <https://jdih.maritim.go.id/berita>.

<https://dailysocial.id/post/analisis-data>.

Nur Jamal Shaid, Muhammad Idris, *Lembaga Penjamin Simpanan*,
<https://money.kompas.com/read/2021/12/19/175552026/lembaga-penjamin-simpanan-pengertian-fungsi-tugas-dan-wewenangnya?page=all>.

Redaksi OCBC NISP, 2023, *Bank Umum: Jenis, Fungsi, dan Kegiatan Usaha*,
<https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/23/bank-umum-adalah>.

Ringkasan Pengaturan Bank Indonesia, 2023,
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_032023_Ringkasan.pdf.

Rilda Munarti, *Perlindungan Hukum Atas Dana Nasabah Pada Bank Melalui Lembaga Penjamin Simpanan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 3, September-Desember 2013.

Wetria Fauzi, 2023, *Pengaturan Penjamin Polis sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian*, Nagari Law Review, Vol. 7, No. 2, Desember 2023.